

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN (PBI) DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH :

SANDRA WAHYUNI

18060144/2018

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

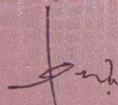
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN (PBI) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Sandra Wahyuni
BP/NIM : 2018/18060144
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

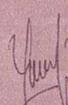
Padang, Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi



Dr. Novva Zulva Riani, SE, M.Si
NIP.19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh,
Pembimbing



Yeniwati, SE, ME
NIP. 19760222 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

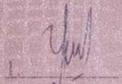
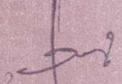
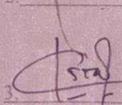
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN (PBI) DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Sandra Wahyuni
NIM/TM : 18060144/2018
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Yeniwati, SE, ME	
2	Anggota	Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si	
3	Anggota	Isra Yeni, SE, M SE	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANDRA WAHYUNI
NIK : 1312034606000003
Tahun Masuk/NIM : 2018 / 18060144
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat / 6 Juni 2000
Program Studi : Ekonomi Pembangunan (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Tanggal Lulus : 15-08-2022



Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama dan NIK
2. Tempat dan Tanggal Lahir
3. Tanggal lulus ujian komprehensif

Pada **Ijazah Bahasa Indonesia** dan **Bahasa Inggris** sudah **BENAR**, jika dikemudian hari terdapat kesalahan, maka saya **TIDAK** akan menuntut pihak Universitas Negeri Padang untuk **CETAK ULANG IJAZAH** atas kelalalan yang saya lakukan. Demikianlah surat pernyataan ini saya tandatangani atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Padang,



Catatan :

1. Sebelum ijazah ditandatangani, periksa terlebih dahulu kebenaran Nama, NIK, tempat dan tanggal lahir serta tanggal lulus ujian komprehensif
2. Jika terjadi kesalahan, Ijazahnya Jangan Ditandatangani dan segera laporkan ke panitia wisuda
3. Tanda tangan tidak kena wajah dan QR Code (lihat contoh)

ABSTRAK

Sandra Wahyuni (18060144) : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibu Yeniwati, SE., ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif dengan metode kuantitatif dan model yang digunakan adalah model regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap peluang peserta mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan status kepemilikan tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap peluang peserta mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Penerima Bantuan Iuran (PBI), Regresi Logistik

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Provinsi Sumatera Barat*”. Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan dorongan, semangat, doa dari kedua orang tua serta berkah dari Allah SWT sehingga masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Selain itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Yeniwati, SE., ME selaku pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran agar dapat memberikan bimbingan dan arahan yang sangat membantu penulis selama penyusunan Skripsi.

Selanjutnya, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE., M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Bapak Joan Marta, SE., M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Yeniwati., SE., ME selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta materi dan penuh sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pegetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
6. Bapak dan Ibu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah mengizinkan penulis magang di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sehingga penulis dapat memperoleh bahan Skripsi untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua saya serta keluarga besar atas segala dukungan, perhatian, perjuangan, dan doa-doa yang tak terhingga.
8. Kepada saudari kandungku tersayang, Salsabila Damayani untuk segala dukungan, motivasi, doa, dan semangatnya selama ini.

9. Sahabatku Nurul Hidayah untuk segala motivasi, dukungan, saran, dan memberikan semangat tak henti-hentinya.
10. Teman-teman magang dinsos atas segala dukungan, semangat, motivasi, inspirasi, dan kebersamaannya selama perskripsian.
11. Kost nenek bondo dua untuk segala bentuk semangat, dukungan, suka duka, dan kebersamaannya selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2018 serta sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal bagi kita semua.

Padang, Agustus 2022

Sandra Wahyuni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kajian Teori	14
1. Kemiskinan	14
2. Penerima Bantuan Iuran (PBI).....	19
3. Pendapatan	23
4. Tingkat Pendidikan.....	26
5. Jenis Pekerjaan	27
6. Status Kepemilikan Tempat Tinggal	28

B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Konseptual	31
D. Hipotesis Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Jenis Data Dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Variabel Penelitian	36
F. Defenisi Operasional Variabel	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
1. Analisis Deskriptif.....	39
2. Analisis Induktif.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
1. Deskriptif Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	47
2. Deskriptif Pendapatan.....	48
3. Deskriptif Tingkat Pendidikan	49
4. Deskriptif Jenis Pekerjaan.....	51
5. Deskriptif Status Kepemilikan Tempat Tinggal.....	52
C. Hasil Analisis Induktif.....	52

1. Analisis Regresi Logistik	52
2. Pengujian Hipotesis	56
D. Pembahasan Hasil Penelitian	58
1. Pengaruh Pendapatan Terhadap Peluang Peserta Mendapatkan Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran)	58
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Peluang Peserta Mendapatkan Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran)	59
3. Pengaruh Jenis Pekerjaan Terhadap Peluang Peserta Mendapatkan Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran)	61
4. Pengaruh Status Kepemilikan Tempat Tinggal Terhadap Peluang Peserta Mendapatkan Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran)	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persentase Peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Di Provinsi Sumatera Barat.....	48
Tabel 4.2 Persentase Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berdasarkan Pendapatan Di Provinsi Sumatera Barat	49
Tabel 4.3 Persentase Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat.....	50
Tabel 4.4 Persentase Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berdasarkan Jenis Pekerjaan Di Provinsi Sumatera Barat.....	51
Tabel 4.5 Persentase Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Di Provinsi Sumatera Barat	52
Tabel 4.6 Uji Kesesuaian Model (<i>Goodness Of Fit</i>)	53
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Signifikansi Faktor-faktor yang mempengaruhi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Likelihood Ratio</i> (G) Peluang Peserta Mendapatkan Bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Di Provinsi Sumatera Barat.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kurva Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Estimasi <i>Regresi Logistik</i>	70
Lampiran 2 Hasil Estimasi <i>Logistik Odds Ratio</i>	70
Lampiran 3 Hasil Estimasi <i>Marginal Effect</i>	71
Lampiran 4 Hasil Estimasi <i>Goodness Of Fit Test</i>	71

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan seringkali dimaknai sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Menurut Rahman D (2015) kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok standar minimal untuk dapat hidup layak. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kemiskinan dimaknai sebagai masalah sosial yang disandang oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan tingkat kesejahtraannya.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Sebagai sebuah konsep, pengukuran kesejahteraan masyarakat mengalami berbagai perkembangan. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Jika masyarakat sejahtera berarti masyarakatnya mengalami kemakmuran.

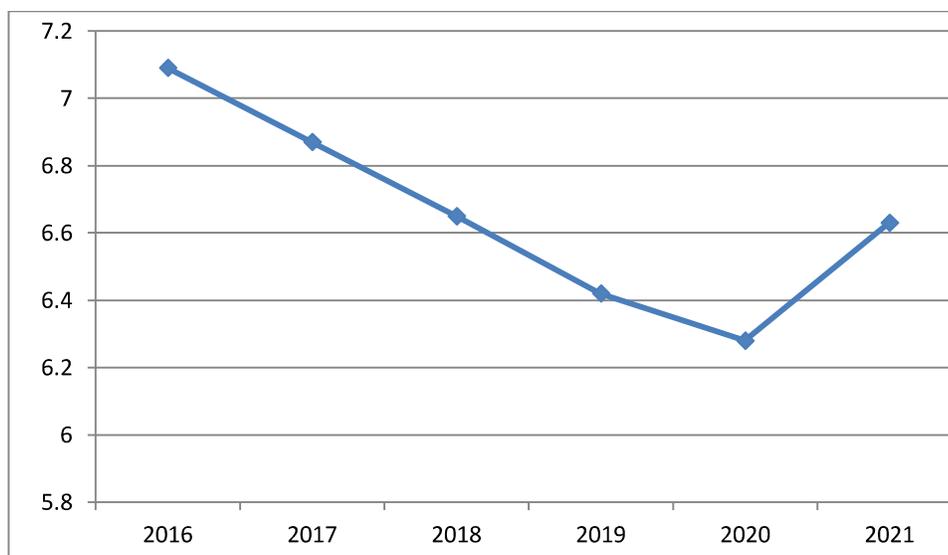
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (PERMENSOS) Nomor 08 Tahun 2012 Bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat maka

diperlukannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan ini erat hubungannya dengan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah. Penduduk miskin, artinya berada dibawah batas garis kemiskinan. Di Indonesia batas ini diukur dengan nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan untuk makanan maupun kebutuhan bukan untuk makanan. Kebutuhan makanan seperti beras, umbi-umbian, ikan, sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan bukan makanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya.

Kemiskinan kerap kali didefinisikan sebagai fenomena ekonomi dalam arti kurangnya pendapatan seseorang untuk memenuhi standar hidup layak. Menurut Levitan (2016) kemiskinan merupakan kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (1999) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Namun, menurut Suyanto (2001) kemiskinan sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan. Kemiskinan juga menyangkut kerentanan,

ketidakberdayaan, keterisolasian sebagaimana dikemukakan oleh Robert Chambers (1997) sebagai perangkap kemiskinan (*deprivation trap*). Dari beberapa definisi kemiskinan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhi standar hidup yang layak.



Sumber : Badan Pusat Statistik.

Gambar 1.1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021. Pada tahun 2021 persentase masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Barat yaitu 6.63% dan pada tahun 2020 yaitu 6.28%. Menurut Krido Saptono selaku koordinator fungsi statistik sosial BPS Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa pada bulan september 2020

jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Sumatera Barat mencapai 3647,79 ribu orang (6,56%). Hal ini membuktikan penambahan sebesar 20,6 ribu orang dibandingkan kondisi maret 2020 yang sebesar 344,23 ribu orang (6,28%). Pada bulan maret 2021 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 370,67 ribu orang atau 6.63%, pada September 2021 turun menjadi 339,93 ribu orang atau berkurang sekitar 30 ribu orang.

Menurut Krido Saptono ada sejumlah hal yang membuat jumlah kemiskinan di Sumatera Barat bertambah. Seperti halnya peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Dimana untuk sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada maret 2020 sebesar 75,83%. Ada 3 jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan yaitu beras, rokok kretek filter, cabai merah, dan tongkol. Sedangkan komoditi bukan makanan paling dominan adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Krido Saptono menjelaskan sejumlah aspek yang mempengaruhi penambahan penduduk miskin di Sumatera Barat adalah pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB triwulan II terhadap triwulan III 2020 tumbuh negatif yaitu 4,49%. Pada Maret - September 2021 garis kemiskinan naik 1,91% dari Rp568.703 per kapita per bulan menjadi Rp. 579.545 per kapita per bulan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dijelaskan bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sementara untuk menghitung garis kemiskinan mencakup komponen garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga ditandai dengan keterbatasan kepemilikan aset yang berkaitan erat dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan. Keluarga miskin merupakan keluarga yang memiliki penghasilan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan yang masih rendah bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan tidak dapat memenuhi standar gizi minimal (Rejekiingsih, 2011). Rendahnya penghasilan keluarga miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan mereka hidup dengan kondisi lemah dan dalam kondisi ketidakberdayaan. Hal ini menyebabkan mereka hidup dalam kerentanan sehingga terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Masyarakat yang berada dalam kondisi miskin mengalami berbagai keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya kebutuhan makan,

akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Berbagai keterbatasan tersebut akan berdampak pada penurunan kualitas hidup dan dampak lanjutannya adalah meningkatnya permasalahan sosial seperti timbulnya penyakit, gizi buruk yang mengakibatkan kematian bayi maupun ibu hamil. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (Eny Hikmawati, 2014).

Fenomena yang terjadi tentang tingkat kesehatan dalam masyarakat adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan, namun juga terjadi di pedesaan. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Beberapa contoh dapat dilihat di daerah-daerah Indonesia pada masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit yang tergolong berat tidak dapat disembuhkan karena tidak memiliki biaya pengobatan. Pada akhirnya lambat ditangani atau sama sekali tidak ditangani sehingga penyakitnya semakin parah bahkan berakibat kematian.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial kemiskinan sangatlah serius. Salah satu usahanya yaitu dengan menerapkan kebijakan dan program yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini dapat berupa program ataupun bantuan sosial yang sudah banyak dilakukan. Bantuan sosial merupakan wujud

program ketahanan ekonomi bagi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan baik dari sisi pangan, kesehatan, pendidikan maupun krisis ekonomi serta bencana alam. Artinya bantuan sosial ditujukan tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan, namun sekaligus sebagai program jaminan perlindungan dalam upaya meminimalisir kerentanan ekonomi rumah tangga miskin.

Setiap negara yang ada di dunia pasti menginginkan masyarakatnya terlepas dari kemiskinan. Sama halnya dengan Indonesia yang menginginkan agar masyarakatnya sejahtera. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah membuat sebuah program yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI). Program ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu program ini di khususkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Sehingga nantinya diharapkan program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penetapan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan ditetapkan berdasarkan indikator kemiskinan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dimuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini juga megamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk dan termasuk orang asing

yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial. Program jaminan kesehatan tersebut akan diatur oleh suatu badan penyelenggara jaminan sosial.

Badan penyelenggara jaminan sosial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 dan dimulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas 2 kelompok yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang iurannya dibayar oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Sedangkan keluarga miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dasar, dan air bersih. Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Selain fakir miskin, yang

menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah orang yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu. Tujuan JKN adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Salah satu isu yang menjadi masalah dalam penerapan program BPJS Kesehatan adalah masyarakat yang sering mendapat informasi kebijakan yang simpang siur sehingga timbulah berbagai opini-opini yang beragam dan kadang menyesatkan. Selain itu kendala yang dialami BPJS dalam proses integrasi meliputi kendala kepesertaan terutama adalah masalah NIK peserta (belum mempunyai NIK, ganda, dsb) dan masih lemahnya sistem informasi BPJS pada awal integritas.

Selain bantuan sosial JKN-PBI (Penerima Bantuan Iuran) pemerintah sudah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu program Raskin (beras sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan program terakhir yang diluncurkan adalah program E-Waroeng (waroeng elektronik). Program E-Waroeng ini dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program ini di khususkan untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga nantinya diharapkan program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

E-Warong adalah tempat penyaluran yang telah disepakati antara Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dengan Bank Penyalur melalui pemetaan

lokasi dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan jaringan telekomunikasi, serta jumlah dan sebaran KPM (keluarga penerima manfaat). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan diantaranya dilakukan pemberdayaan kelompok usaha bersama melalui pembentukan E-Warong. Pembentukan E-Warong sangat diperlukan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peran E-Warong Kube sangat bersinergi dengan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan fakir miskin terutama dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam pelaksanaan program e-warong masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh e-warong. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan dan mengembangkan program ini agar dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah harus mampu mengontrol pelaksanaan program e-warong agar berjalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun pada penelitian ini berfokus pada bantuan sosial yaitu jaminan kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam program Penerima Bantuan Iuran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Di Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Sumatera Barat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan terhadap peluang peserta untuk mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan terhadap peluang peserta untuk mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh jenis pekerjaan terhadap peluang peserta untuk mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh status kepemilikan tempat tinggal terhadap peluang peserta untuk mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap peluang peserta mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap peluang peserta mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh jenis pekerjaan terhadap peluang peserta mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh status kepemilikan tempat tinggal terhadap peluang peserta mendapatkan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain, sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi sumber daya manusia.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan jaminan kesehatan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Sumatera Barat.

4. Sebagai bahan sumbangan bagi ilmu ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.